

IMPLEMENTASI PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOGIRI

Oleh : Adhityawahyu Wardana & Joko Suranto

Abstract

Wardana; Suranto, 2018. "analyze the implementation of to delegating part of the authirity of goverment affairs to Capital Investment and Integrated One Stop Service Office in Wonogiri Regency", Slamet Riyadi University, Surakarta, Thesis, unpublished.

This Research aimed to analyze the implementation of to delegating part of the authirity of goverment affairs to Capital Investment and Integrated One Stop Service Office in Wonogiri Regency. This research was descriptive research type. Capital Investment and Integrated One Stop Service Office in Wonogiri Regency Office (PMPTSP) was selected as the research site. Two kind of sampling techniques was implemented. First, purposive sampling technique was used to select the informants originating from the employees of PMPTSP. Secondly, accidental sampling technique was employed to collect the data coming from the community opinions. In-depth interview, direct observation, and documentation data collecting techniques were used. Interactive data analysis model as suggested by Miles and Hubberman was employed in this research analysis. This interactive analysis model covers: data gathering, data reduction, data display, and conclusion drawing. Research results indicated that: 1. Relating to the aspect of communication, it was discovered that PMPTSP Office has already implemented to socialize its policies using some activities and employing some existing information media and has already coordinated with the OPD Technique Unit. 2. Relating to the resources, research result indicated that PMPTSP was lack of human resources, minimum budget, and deficiencies in the aspect structure and infrastructure for supporting service. 3. In term of implementation aspect, it indicated that the apparatus of PMPTSP had clear commitment and responsibilities and supported the policy implementation. 4. Beureucratic and organizational structure did not supported yet the implementation of the delegation part of goverment affairs authority in field of service licenses and non-licenses. 5. Dealing with economic, social and political enviroentment, research result showed that people in Wonogiri Regency supported the policy implementation, however, on the other hand, OPD less supported the implementation of to delegating part of the authirity of goverment affairs to Capital Investment and Integrated One Stop Service Office in Wonogiri Regency.

Key words: Communication; resource; delegation; authority; beureaucratic and organizational structure; economic, social and political enviroentment.

1. Pendahuluan

Munculnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang kemudian melatar belakangi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal menyebabkan setiap daerah membuat peraturan tersendiri untuk mengakomodir Undang-Undang dan Perpres ini ke dalam kebijakan daerahnya masing-masing, termasuk Kabupaten Wonogiri yang kemudian mengakomodir ke dalam kebijakan daerahnya, melalui Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.

Peraturan Bupati ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonogiri, yang sudah dicabut oleh karena adanya penyempurnaan jenis-jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditangani dan terjadinya perubahan struktur organisasi dan tata kerja kelembagaan yang mampu urusan pemerintahan bidang penanaman modal dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri) Kabupaten Wonogiri menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Kabupaten Wonogiri pada awal tahun 2017 yang lalu.

Munculnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjalankan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu yang telah diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang diharapkan dapat menaikkan atau menambah jumlah investor yang ada di Kabupaten Wonogiri jika menggunakan pelayanan terpadu satu pintu khususnya di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Di dalam konsiderannya, Peraturan Bupati ini juga menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu memerlukan adanya suatu pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan (dari Bupati sebagai Kepala Daerah) untuk

menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.

Banyaknya jenis pelayanan perizinan dan non perizinan (111 jenis) yang didelegasikan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri ini tentunya memerlukan dukungan sumber daya internal maupun dukungan dari eksternal di luar Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri yaitu lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri sendiri, seperti organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Dinas PMPTSP tersebut.

Dalam implementasi suatu program kebijakan tentunya tidak terlepas dari beberapa permasalahan atau kendala. Begitu pula dengan implementasi pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri, yang setidaknya ada 3 (tiga) permasalahan yang paling menonjol dalam implementasinya, yaitu antara lain :

1. Faktor sumber daya seperti : 1) jumlah personil pelayanan yang kurang ideal; 2) anggaran yang ‘minimalis’; dan 3) kondisi sarana prasarana dan fasilitas pendukung pelayanan yang kurang memadai.
2. Faktor struktur birokrasi / organisasi yang ditetapkan tidak seimbang dengan beban kerja organisasi.
3. Faktor dukungan eksternal terutama dari organisasi perangkat daerah teknis yang masih kurang maksimal.

Adapun penulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi yang mempengaruhi kebijakan menurut George C. Edward III dan menurut Van Metter dan Van Horn, yaitu :

a. Komunikasi (George C. Edward III)

Komunikasi berdasarkan model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Subarsono, 2009:92), yaitu bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*targed group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumber Daya (George C. Edward III)

Sumber daya berdasarkan model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Subarsono, 2009:92), yaitu bahwa meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c. Sikap Pelaksana/Disposisi (George C. Edward III)

Sikap pelaksana/disposisi berdasarkan model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Subarsono, 2009:92), adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi/Organisasi (George C. Edward III)

Struktur birokrasi/organisasi berdasarkan model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Subarsono, 2009:92), yaitu mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

e. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik (Van Metter dan Van Horn)

Van Metter dan Van Horn (dalam Samodra Wibawa 2005:79) berpandangan bahwa lingkungan merupakan faktor-faktor di luar organisasi yang bisa memberi pengaruh positif maupun negatif kepada organisasi. Definisi yang paling populer pada sekarang ini untuk mendefinisikan lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi.

Lingkungan organisasi itu sendiri terdiri dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi itu. Umumnya lingkungan mencakup pemasok, pelanggan, pesaing, badan pengaturan Pemerintah, kelompok publik penekan dan lainnya. Dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:144). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu merupakan suatu metode yang bertujuan menjelaskan/menggambarkan keadaan yang ada di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta yang saling berhubungan serta bukan hanya mencari kebenaran mutlak, tetapi pada hakekatnya mencari pemahaman observasi, sedangkan mengenai pendekatan kualitatif menurut pendapat Kirk dan Miller dalam Moeleong (2000:3), yaitu merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan implementasi kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri dalam mengimplementasikan kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Wonogiri apabila dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, dapat dikatakan bahwa para aparatur pelaksana terlihat mengetahui apa yang harus dilaksanakan yaitu memahami tujuan dan sasaran serta dapat mentransmisikan implementasi kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri

di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada kelompok sasaran (*targed group*) yaitu masyarakat penerima pelayanan di wilayah Kabupaten Wonogiri.

Selain itu, komunikasi juga dilakukan melalui koordinasi dengan OPD teknis. Hal ini dapat mengurangi distorsi implementasi dan bahkan akan sangat mendukung implementasi pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, karena implementasi kebijakan akan menjadi lebih jelas dan konsisten di tiap level birokrasi, dari level pimpinan tertinggi sampai level staf pelaksana di bawah.

b. Sumber Daya

Kondisi kepegawaian pada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri dirasa tidak seimbang dengan beban kerja yang diemban, dimana Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri diberikan pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan bidang penanaman modal sebanyak 111 jenis perizinan dan non perizinan yang efektif hanya dilaksanakan oleh 10 orang pegawai saja yang terbagi menjadi *Front Office* (FO), *Back Office* (BO) hingga Kepala dan sebagian besar bukan merupakan staf yang bersifat teknis untuk melayani perizinan yang bersifat teknis seperti perizinan bidang kesehatan, perdagangan, konstruksi, dan sebagainya mengingat Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri bukan merupakan OPD teknis sehingga ini dapat menjadi permasalahan terhadap implementasi pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Disamping itu, Anggaran belanja Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri cenderung minimalis untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan beban kerja yang secara faktual besar, meski secara regulasi daerah (Peraturan Daerah) ditetapkan Dinas tipe B (beban kerja sedang). Di sisi lain, fasilitas dan sarana prasarana kantor pada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri masih kurang memadai dan memerlukan beberapa perbaikan dan pemeliharaan secara kontinyu, seperti area parkir, ruang pelayanan, ruang pertemuan dan beberapa fasilitas penunjang lainnya.

Dengan adanya kekurangan personil, anggaran, dan fasilitas sarana prasarana pada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri apabila dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, maka akan dapat mengakibatkan implementasi pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan tidak berjalan efektif.

c. Sikap Pelaksana / Disposisi

Aparatur pelaksana kebijakan mempunyai komitmen yang jelas dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri yang ditunjukkan mulai dari pimpinan tertingginya (*top manager*) yaitu Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri. Disamping itu, pelaksana kebijakan mendukung dan telah bertanggung jawab dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sikap pelaksana kebijakan implementasi pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan apabila dianalisis menggunakan pendapat/teori berdasarkan model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dirasa sudah sesuai karena sikap aparatur Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri menunjukkan komitmen yang jelas dan sungguh-sungguh dimulai dari aparatur yang paling berpengaruh di level pimpinan (Kepala) hingga staf pelaksana.

Aparatur Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri juga menunjukkan sikap mendukung dan bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

d. Struktur Birokrasi / Organisasi

Struktur organisasi dirasa belum mampu mendukung pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri dan belum mencerminkan beban kerja besar yang diampu oleh Dinas PMPTSP Kab. Wonogiri dengan 111 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani. Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri yang merupakan pengampu urusan pemerintahan bidang penanaman modal terutama pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Wonogiri merupakan dinas tipe B yang artinya dinas atau OPD dengan kategori beban kerja sedang. Ditemukan data dan fakta bahwa sebelum dibentuknya kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Wonogiri termasuk Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri, telah dilakukan serangkaian pemetaan besaran urusan pemerintahan termasuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Untuk pemetaan urusan bidang penanaman modal

dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), didasarkan pada indikator yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang secara kronologis pembentukan kelembagaan Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri, berdasarkan hasil validasi pemetaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal oleh Pemerintah Pusat (Kemendagri dan BKPM) yang dikuatkan dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal bahwa tingkat intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal di Kabupaten Wonogiri kategori besar (score 880), sehingga OPD yang mengampu urusan penanaman modal di Kabupaten Wonogiri yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri seharusnya merupakan tipe dinas kategori A (beban kerja besar).

Namun, OPD pengampu urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Kabupaten Wonogiri (Dinas PMPTSP) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri ditetapkan tipologi Dinas B (beban kerja sedang). Sehingga, dapat dikatakan OPD pengampu urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Kabupaten Wonogiri (Dinas PMPTSP) merupakan tipologi Dinas B (beban kerja sedang) menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan tingkat intensitas dan beban kerja kategori besar, apalagi Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri mendapatkan pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan terutama di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sebanyak 111 jenis pelayanan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri.

Kondisi di atas apabila dikaitkan dengan pengertian birokrasi menurut Hessel (2005:29), maka pembentukan struktur organisasi Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri tidak *ditetapkan secara rasional*. Penetapan struktur organisasi pelaksana kebijakan implementasi pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan terutama di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kabupaten Wonogiri dapat dianggap kurang rasional, karena tipologi Dinas B (beban kerja sedang) menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan tingkat intensitas dan beban kerja kategori besar. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan permasalahan implementasi pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Analisis menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, maka struktur birokrasi/organisasi Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri kurang dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap implementasi pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan. Di sisi lain, berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri sudah memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan. Dengan adanya penerapan SOP pelayanan ini, Dinas PMPTSP sudah menerapkan tata kelola birokrasi pelayanan yang baik dan tertata.

e. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Secara umum masyarakat Wonogiri mendukung adanya kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, namun tetap berharap bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan dimaksud agar benar-benar dapat 'satu pintu'.

Konsep kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau dalam suatu pelayanan terpadu satu pintu di wilayah Kabupaten Wonogiri secara faktual di lapangan belum 100% terpenuhi dan masih terkesan seperti 'pelayanan terpadu satu pintu dengan banyak jendela'.

Disamping itu, Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri menerima pendelegasian sebagian kewenangan sebanyak 111 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan, namun dari 111 pelayanan yang didelegasikan tersebut baru sebagian kecil yang sudah mempunyai dasar hukum/aturan teknis daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri diberikan pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang semula kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis tanpa diberikan aturan teknis yang mengatur mekanisme dan prosedur pelayanannya, oleh karenanya sebagian besar masih mengacu pada aturan teknis dari pusat yang terkadang kurang sesuai dengan kondisi di daerah, sehingga Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan, karena Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri bukan OPD yang bersifat teknis murni.

Faktor lingkungan dari luar organisasi Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri, terutama OPD teknis masih kurang dalam memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri.

Hal ini apabila dianalisis dengan pendapat/teori berdasarkan model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn, maka kurangnya dukungan dari OPD teknis (eksternal) ini dapat mempengaruhi kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri, terutama dalam mencapai tujuan sesuai konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada khususnya dan implementasi pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara umum.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan terhadap implementasi pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Implementasi pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 jo Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau dalam suatu pelayanan terpadu satu pintu.

b. Berdasarkan indikator penelitian yang digunakan, maka implementasi pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1) Komunikasi

Berkenaan dengan indikator komunikasi yang telah dilakukan dalam kebijakan Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri terutama terkait pelayanan perizinan dan non perizinan

berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 jo Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 sudah dilaksanakan.

Komunikasi pelaksana (Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri) dengan masyarakat penerima pelayanan dilakukan melalui kegiatan seperti *workshop* sosialisasi peraturan perundang-undangan dan interaksi secara langsung dengan masyarakat. Sosialisasi juga ada yang dilakukan secara tidak langsung melalui media seperti melalui siaran radio di Radio Giri Swara (RSPD) Wonogiri; melalui media sosial seperti *website*, *twitter* dan *facebook* resmi Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri; melalui *leaflet*, *booklet*, baliho, *banner*, dan sebagainya.

Komunikasi juga dilakukan Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri dengan OPD teknis lain terutama terkait dengan sinkronisasi jenis-jenis pelayanan perizinan yang sebagian persyaratannya masih ada di OPD teknis lainnya seperti rekomendasi-rekomendasi teknis yang mempengaruhi proses pelayanan.

2) Sumber Daya

Berkenaan dengan indikator sumber daya baik itu sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas/sarana prasarana, dapat dijelaskan bahwa terkait kondisi sumber daya manusia/kepegawaian pada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri masih kekurangan personil terutama pada bidang yang secara langsung melayani perizinan dan non perizinan secara langsung yaitu pada bidang PTSP. Kondisi kepegawaian pada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri dimaksud dirasa tidak seimbang dengan beban kerja yang diemban, dengan adanya pendelegasian kewenangan urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sebanyak 111 jenis yang efektif hanya dilaksanakan oleh 10 orang pegawai saja yang terbagi menjadi *Front Office* (FO), *Back Office* (BO) hingga Kepala dan sebagian besar bukan merupakan staf yang bersifat teknis.

Selanjutnya terkait anggaran belanja pada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri juga dirasa ‘minimalis’ untuk seukuran Dinas yang secara faktual memiliki beban kerja besar, meskipun secara yuridis ditetapkan sebagai Dinas yang mempunyai beban kerja sedang (tipe B).

Sedangkan dari segi sumber daya fasilitas dan sarana prasarana kantor pada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri masih kurang memadai dan memerlukan beberapa perbaikan dan pemeliharaan secara kontinyu.

3) Sikap Pelaksana / Disposisi

Sikap pelaksana kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri berdasarkan penelitian terlihat mendukung dan telah bertanggung jawab dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 jo Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017.

Hal ini terlihat dari komitmen seluruh pegawai dari pimpinan hingga staf Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri dalam mendukung dan mengamankan kebijakan daerah terkait pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan terutama di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri. Tanggung jawab para pelaksana juga terlihat dari rutinitas penyampaian laporan penyelenggaraan sebagian kewenangan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4) Struktur Birokrasi/Organisasi

Struktur birokrasi/organisasi Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri dirasa belum mampu mendukung pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kabupaten Wonogiri dan belum mencerminkan beban kerja besar yang diampu oleh Dinas PMPTSP Kab. Wonogiri dengan 111 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani.

Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri yang merupakan pengampu urusan pemerintahan bidang penanaman modal terutama pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Wonogiri merupakan tipologi Dinas B (beban kerja urusan sedang) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan tingkat intensitas dan beban kerja kategori besar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman modal.

Meskipun demikian, Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri sudah memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dengan baik.

5) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Sebenarnya masyarakat penerima pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri mendukung adanya kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, namun tetap berharap bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan agar benar-benar dapat dilaksanakan 'satu pintu'.

Konsep kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau dalam suatu pelayanan terpadu satu pintu di wilayah Kabupaten Wonogiri secara faktual di lapangan belum 100% terpenuhi karena masih adanya persyaratan-persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh OPD teknis lain, sehingga terkesan seperti 'pelayanan terpadu satu pintu dengan banyak jendela'.

5. Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Nogi, Hasell. 2005. *Manajemen Publik*. Grasindo. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Subarsono, AG, Drs, M.Si, MA. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Wibawa, Samudra, dkk. 2005. *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.